

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam memperkuat perekonomian masyarakat

Inten Kinasih¹, Bambang Widiyahseno^{2*}, Ekapti Wahjuni DJ³.

^{*123} Prodi Ilmu Pemerintahan, FISIPOL, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia

* bbwidiyahseno@umpo.ac.id

Submisi: Juni 2019; Penerimaan: Desember 2019

Abstrak

Keberadaan Pemerintah Desa, saat ini tidak lagi sebagai wilayah yang terpinggirkan, terlebih pasca di resmikan undang – undang no 06 tahun 2004 Tentang Desa, wajah desa berubah drastis, dimana desa di berikan dana dari pemerintah pusat yang jumlahnya sangat besar, sehingga dituntut untuk bisa memanfaatkan sumber daya yang dimiliki supaya dikelola, salah satu alternatif yang mungkin dilakukan adalah mengembangkan BUMDes sebagai lembaga yang dikelola secara profesional untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Kajian ini menggunakan metode Deskriptif kualitatif, dengan menggunakan data primer dan sekunder, berupa: hasil wawancara, observasi, dan juga dokumentasi, sedangkan untuk mendapatkan data hasil wawancara peneliti menentukan informan atas dasar pemahamannya terhadap obyek kajian. Hasil penelitian menjelaskan jika Upaya BUMDes “Mekar Sari” sangat terlihat dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, hal tersebut nampak pada Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Morosari pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp 9.264.000,00,- atau jika di prosentasekan mendapat keuntungan sekitar 0,064% dari PAD Desa Morosari, meskipun prosentase tersebut masih terlalu sedikit, tetapi jika dibandingkan dengan pemasukan Pendapatan Asli Desa yang lainnya, sudah cukup besar. Meskipun kontribusi BUMDes “Mekar Sari” tidak terlalu banyak mengalir ke Pendapatan Asli Desa, akan tetapi kegiatan tersebut telah menjadikan Desa Morosari menjadi mandiri sehingga tidak selalu bergantung dengan Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD). Tidak optimalnya peran BUMDes Mekar Sari dalam pengembangan ekonomi desa yaitu terkait dengan tahapan awal yang masih dilakukan sebagai upaya rintisan, sehingga masih memiliki banyak kekurangan dalam pelaksanaannya, akan tetapi jika diimbangi dengan pengembangan unit usaha yang ada pastinya akan meningkat juga hasil prosentase yang diperoleh pertahunnya.

Kata kunci: BUMDes; Kesejahteraan; Pemerintah Desa

Abstract

The existence of the village administration, not be used as a territory of the margins of life , moreover it was in the aftermath of act no 06 Tahun 2004 about village, The village, drastic change where villages in grant funds from the central government which amount is very large, so that they can make use of resources are required to have, managed that, One alternative is to develop possible "BUMDes" as an institution which managed to increase their own local professional to reach. public welfare. he studies used a method of descriptive qualitative, using data primary and secondary, in the form of, interviews, observation and also, documentation and to obtain data interviews researchers determine informants on the basis of our insights against an object study. The research results explain if efforts to BUMDes "Mekar Sari" very much look in the development and economic growth, It is visible on their Pendapatan Asli Desa (PAD) Morosari Village in 2017 9.264.000,00, RP - or if percentage benefit around 0,064 % of Pendapatan Asli Desa (PAD), village although it is still too few, percentage but compared to revenue,

another village has already played a major. Although the BUMDes "Mekar Sari" not too much revenue flows into, village but these activities have made Morosari village be independent and not depend with Dana Desa (DD) and Alokasi Dana Desa (ADD). The low performance of the role of BUMDes "Mekar Sari" in the development of economic villagers namely relating to the initial phase still, efforts are based and still has many deficiencies in its implementation, but if balanced development of existing business units will surely also the result of increased percentage obtained. every year.

Keyword: *BUMDes; Welfare; the village government*

Pendahuluan

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditujukan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling konkrit (Syamsi, 2014)

Pembangunan daerah pedesaan menjadi prioritas utama yang terus digalakkan untuk menunjang pembangunan nasional. desa memiliki wewenang yang mencakup:urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. (Oleh, 2014)

Perkembangan desa dalam sistem pemerintahan membawa pengharapan bagi pembangunan dan penciptaan kesejahteraan, mulai dari lahirnya undang – undang no 06 tahun 2014 tentang Desa, telah banyak merubah sistem pemerintahan desa, selain secara kelembagaan, Desa kemudian menjelma sebagai pemerintahan yang bermodalkan dana besar untuk mengelola daerahnya secara mandiri.

Kebijakan tata kelola desa yang dimuat dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dianggap sebagai kebijakan yang membawa harapan baru dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Beberapa kebijakan tersebut, diantaranya adalah alokasi anggaran yang besar kepada desa yang dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran desa dalam pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. (Indrianasari, 2017)

Dana desa sendiri sudah mulai diberikan pada tahun anggaran 2015. Besarannya belum mencapai jumlah yang diharapkan. Pada tahun tersebut pemerintah baru menganggarkan dana

desa sebesar 3,23% dari seluruh dana perimbangan. Jumlah ini jauh dari ketentuan undang-undang yang mencapai 10%. Pada tahun 2016 jumlahnya mencapai Rp 46,98 Trilyun Rupiah, hingga saat ini baru mencapai 6,5 persen dari total anggaran belanja transfer ke daerah (Isto Widodo, 2017)

Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta. (diakses dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5800> pada 11 Januari 2019)

Tujuan adanya ADD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, adalah: 1). Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. 2). Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat. 3). Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan. 4). Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial. 5). Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat. 6). Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. 7). Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat. 8). Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) (Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, 2012).

Berangkat dari sumberdaya finansial yang memadai dan juga tujuan dari adanya dana Alokasi Desa (ADD), pemerintah desa dituntut untuk memiliki strategi dalam rangka pengembangan dan pembangunan desa, agar tercipta kemandirian dan kesejahteraan pada masyarakatnya, sumberdaya yang finansial yang cukup bukan berarti membuat desa hanya bersantai – santai tanpa melakukan aktifitas pembangunan, tetapi dalam kondisi tersebut desa dituntut untuk berupaya meningkatkan pendapatan melalui usaha dan program – program yang dapat dilakukan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Keberadaan BUMDES untuk

mewujudkan perekonomian desa yang Mandiri sangat diperlukan. Melalui BUMDES diharapkan antar lembaga yang ada di masyarakat saling bersinergi untuk lebih maksimal menciptakan kesejahteraan masyarakat yang setara.(Zulkarnaen, 2016)

Keberadaan BUMDes membawa perubahan yang signifikan di bidang ekonomi dan juga sosial. Pergeseran nilai sosial dan juga perubahan pola interaksi antar warga akan terjadi. BUMDes memberikan peningkatan Pendapatan Asli Desa, namun pendapatan ini tidak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan warga berpendapat bahwa keberadaan BUMDes tidak membawa manfaat signifikan bagi peningkatan kesejahteraan warga (Anggraeni, 2016).

Munculnya BUMDes yang dianggap sebagai salah satu alternatif ataupun solusi, bagi pemerintah desa untuk meningkatkan pendapatan guna menciptakan negara kesejahteraan, tentu menarik jika kita kaji lebih dalam, apakah BUMDes yang dibentuk dan berada di daerah – daerah ataupun pelosok mampu menjawab harapan semua pihak.

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu bagian kecil dari daerah tingkat II di Provinsi Jawa Timur yang berpotensi untuk pengembangan BUMDes mengingat wilayahnya terdiri dari banyak sekali desa – desa terpencil, yang membutuhkan inovasi dan pendampingan, salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa Morosari, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, BUMDes ini mengelola beberapa usaha yang berangkat dari potensi daerah seperti hasil pertanian dan perkebunan, dan kemudian dikembangkan serta dikelola dengan baik, bagaimanakah peran BUMDes dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat desa, melalui pengelolaan aset secara professional, maka hal tersebut bisa dijadikan bahan yang menarik untuk dikaji.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempersiapkan, dan menganalisis data sehingga mendapat gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Metode analisis deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antar fenomena yang diteliti (Dwi Febri Arifiyanto, 2014)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu Peneliti itu sendiri, Panduan Wawancara (*Interview Guide*), dan Catatan lapangan (*Field Note*). Metode analisa data yang di

gunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan reduksi data, Penyajian Data, dan penarikan kesimpulan/Verifikasi. Untuk mengetahui kebenaran hasil penelitian perlu ditetapkan keabsahan (*trustworthiness*) datanya, dalam penelitian ini dilakukan uji kredibilitas. Untuk menguji Kredibilitas data/tingkat kepercayaan data tersebut peneliti menggunakan Triangulasi Teknik, yaitu dengan cara pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. (Queen & Widi, 2016)

Analisis data menggunakan metode analisis model interaktif yang menurut *Milles* dan *Huberman* dalam *Sugiyono* yakni meliputi beberapa tahapan, berikut : reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.(Erlin Damayanti, Mochammad Saleh Soeaidy, 2011)

Penelitian ini dalam mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara, namun terlebih dahulu peneliti menentukan siapa saja yang akan diwawancarai dan atas pertimbangan apa memilih informan, pertimbangan yang digunakan adalah pemahaman informan terhadap materi atau obyek yang dikaji, yakni BUMDes. Informan yang dipilih antara lain sebagai berikut.

Tabel 1. Data diri Informan

No	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Jabatan	Alamat
1	Boimin	L	Kades	Dukuh Krajan Rt 01 Rw 01, Desa Morosari, Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo
2	Trimawan	L	Kaur Pembangunan	Dukuh Krajan Rt 2 Rw 01, Desa Morosari, Kecamatan Sukorejo Ponorogo
3	Hermanto	L	Anggota BUMDes	Dukuh Krajan Rt 01 Rw 02, Desa Morosari, Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo
4	Marpi	P	Ketua PKK	Dukuh Krajan Rt 01 Rw 01, Desa Morosari, Kecamatan Sukorejo Ponorogo
5	Rosidah	P	Masyarakat	Dukuh Lor Kali Rt 01 Rw 01, Desa Morosari, Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

Sumber: diolah dari data hasil penelitian

Hasil Dan Pembahasan

Peranan BUMDes dalam Kehidupan Masyarakat

“ Sejauh ini peranan BUMDes dalam penyediaan kebutuhan masyarakat baik, dimana dengan adanya beberapa unit usaha yang dimiliki BUMDes Mekar Sari, salah satu contoh dalam unit usaha persewaan terop. Dahulu sebelum adanya persewaan terop masyarakat desa harus menyewa ke desa sebelah, dan dengan adanya hak tersebut

sekarang pemasukan kas BUMDes menjadi bertambah sehingga juga akan berdampak baik juga ke PADes.” (sumber diolah dari data hasil wawancara dengan Bapak Bimin sebagai Kepala Desa Morosari, 12 April 2017)

“Pada dua tahun terakhir ini keberadaan BUMDes jika dilihat dari proses pelaksanaannya saya rasa sangat baik dibuktikan dengan adanya penambahan unit usaha yang baru, serta jika kita lihat pada tahun yang lalu BUMDe Mekar Sari juga ikut serta dalam menambah hasil pemasukan ke Pendapatan Asli Desa (PADes).” (sumber diolah dari data hasil wawancara dengan Bapak Trimawan sebagai Kaur Pembangunan Desa Morosari, 12 April 2017)

“ Saya disini sebenarnya anggota baru yang masuk dalam strukter organisasi BUMDes mekar sari jadi jika ditanya terkait kontribusi BUMDes terhadap Pendapatan Asli Desa juga tidak begitu faham. Akan tetapi setahu saya pada tahun lalu BUMDes menyetorkan pendapatan Sebesar Sembilan juta Sekian Kepada Desa. Kalau terkait perubahan BUMDes apakah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaa menurut saya mengalami perubahan yang buktinya unit usaha yang dulu hanya persewaan saja sekarang menjadi bertambah,” (sumber diolah dari data hasil wawancara dengan Bapak Hermanto sebagai Anggota BUMDes Desa Morosari, 15 April 2017)

Dengan adanya penambahan unit baru tersebut menjadikan penghasilan kas BUMDes Mekar Sari mengalami peningkatan, dan secara otomatis juga pasti BUMDes juga ikut serta didalam peningkatan pemasukan ke Pendapatan Asli Desa. Selain itu mbak sis baik dengan adanya BUMDes dapat menambah lapangan pekerjaan untuk masyarakat Desa Morosari khususnya bagi para ibu-ibu. Dalam hal ini ibu-ibu ikut berperan serta dalam proses produksi dalam unit usaha pembuatan kripik.” (sumber diolah dari data hasil wawancara dengan Ibu Marpi Ketua PKK Desa Morosari, 10 April 2017)

“Banyak sekali unit usaha yang dimiliki BUMDes saat ini dan dengan adanya hal tersebut menjadikan Masyarakat Mudah untuk memanfaatkan keberadaannya jikalau membutuhkan tanpa harus susah-susah cari ke Desa tetangga. Dan dengan hak tersebutkan pastinya akan berdampak baik pada pendapatan keuangan di BUMDes itu sendiri mbak.” (sumber diolah dari data hasil wawancara dengan Ibu Rosidah Tokoh Masyarakat Desa Morosari, 10 April 2017)

Tabel 2. Jenis Usaha yang di kelola BUMDes

No	Jenis Usaha	Keterangan
1	Unit Usaha Persewaan a. Persewaan Terob. b. Persewaan Molem	Merupakan bentuk usaha persewaan barang dan jasa, dimana jenis usaha persewaan ini lah yang merupakan unit usaha BUMDes yang pertama kali didirikan.
2	Unit Usaha Keripik	Merupakan bentuk unit usaha yang bergerak dalam produksi hasil dari SDA yang ada di desa yaitu berupa hasil panen singkong dan pisang, yang kemudian diolah dan diproduksi oleh BUMDes menjadi keripik untuk meningkatkan nilai jualnya.
3	Unit Usaha Depo Air Isi Ulang	Merupakan bentuk unit usaha yang bergerak dalam jasa pengisian air bersih isi ulang. Dimana unit usaha ini masih belum sepenuhnya milik BUMDes Mekar Sari, yaitu dimana unit usaha ini dilakukan kerja sama antar perseorangan dengan BUMDes.

Sumber: diolah dari data hasil penelitian

Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekar Sari Desa Morosari berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Morosari. Yakni sebesar Rp 9.264.000,00,- atau jika di prosentasekan sekitar 0,064% dari PAD Desa Morosari. Semenjak berdirinya BUMDes pada tahun 2014 sampai dengan sekarang mengalami perubahan yang sangat signifikan dimana yang dulu pertama unit usaha yang ada hanya bergerak pada jasa persewaan terob dan molem, akan tetapi seiring berjalannya waktu bertambah 2 unit baru yakni unit usaha pembuatan kripik dan unit depo air isi ulang. Dengan adanya ke tiga unit tersebut dapat memenuhi kebutuhan para masyarakat, dimana dengan adanya unit persewaan sekarang para warga tidak usah jauh-jauh menyewa peralatan terob maupun molem ke Desa lain yang dengan biaya sewa cukup lebih mahal jika dibandingkan dengan menyewa di kepemilikan BUMDes. Sama halnya dengan unit usaha pembuatan keripik, dimana dahulu para warga kesusahan untuk menjual hasil panen berupa singkong atau pisang. Dimana hasil jual dua komoditi tersebut sangat mura jika di jual begitu saja ke pasar, dan semenjak adanya unit usaha produksi keripik ini hasil panen tersebut di olah dan menjadikanya nilai jual yang menjadi tinggi.

Dampak keberadaan Program BUMDes Kehidupan Masyarakat

“ Ekonomi Desa Morosari saat ini cukup lumayan stabil dimana berkat keberadaan BUM Desa yang sedikit membantu perkembangan ekonomi Desa. Upaya BUMDes dalam hal mengembangkan ekonimi desa untuk saat ini saya rasa lumayan sedikit meningkatkan prosentasenya, dimana yang dulunya unit kerja BUMDes hanya bergerak dibidang persewaan saja akan tetapi saat ini bertambah ke unit usaha keripik, jadi ya bisa

membantu dalam peningkatan ekonomi desa. (sumber diolah dari data hasil wawancara dengan Bapak Bimin sebagai Kepala Desa Morosari, 12 April 2017)

“ Upayanya jika diprosentase untuk tahun ini saya kira masih sedikit, akan tetapi ya cukup baiklah jika dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Bisa dikatakan ada sedikit peningkatan setidaknya. Keberadaan perekonomian Desa pada saat bagaimana yaa..? saya rasa masih sama dengan tahun tahun yang sebelumnya, dimana kebanyakan pekerjaan penduduk di Desa ini adalah agraris yaa jadi yaa saya kira sama saja tidak ada perubahan, dan jika pun ada perubahan mungkin hanya mengalami sedikit perubahan yang ada jika lau musim panen yang melimpah.” (sumber diolah dari data hasil wawancara dengan Bapak Trimawan sebagai Kaur Pembangunan Desa Morosari, 12 April 2017)

“Mengalami sedikit peningkatan saya rasa. Yang dulunya ekonomi desa termasuk dalam garis merah dan sekarang beransur menjadi ke desa yang maju dan memiliki potensi yang banyak jika mau mengembangkan potensi yang lebih banyak. cukup berupaya dalam meningkatkan perekonomian desa, selain itu juga dengan adanya BUMDes ini juga dapat menggali potensi yang ada di desa serta dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang baru untuk masyarakat desa. Jadii bisa dikatakan selain membantu mengembangkan meningkatkan perekonomian desa BUMDes juga dapat menciptakan pekerjaan untuk masyarakat desa.” (sumber diolah dari data hasil wawancara dengan Bapak Hermanto sebagai Anggota BUMDes Desa Morosari, 15 April 2017)

“ Sangat bagus sekali mbak menurut saya upaya BUMDes untuk saat ini, yaa meskipun ada beberapa unit kerja yang belum berjalan dengan maksimal akan tetapi BUMDes Mekar Sari lumayan berupaya penting dalam mengembangkan perekonomian masyarakat, khususnya bagi para ibu-ibu yang dirumah banyak nganggurnya dengan adanya unit kerja baru ini ibu-ibu dapat enggunakan waktunya dengan berguna.” (sumber diolah dari data hasil wawancara dengan Ibu Marpi Ketua PKK Desa Morosari, 10 April 2017)

“ Keberadaan BUMDes pada saat ini sangat penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, dimana dengan adanya unit uit usaha yang dapat mengelola sumberdaya alam yang ada serta dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya. Dan bisa dikatakan bawasanya keberadaan BUMDes disini sangat penting sekali peranannya dalam meningkatkan ekonomi masarakat yaitu dengan adanya banyak unit tersebut.” (sumber diolah dari data hasil wawancara dengan Ibu Rosidah Tokoh Masyarakat Desa Morosari, 10 April 2017)

Badan Usaha Milik Desa ini berperan penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa dengan melalui beberapa hal yaitu diantaranya dengan adanya penambahan unit usaha yang ada menjadikan masyarakat lebih mudah dalam proses transaksi keuangan yang hanya beredar di dalam desa saja atau bisa dikatakan siklus peredaran keuangan hanya derada dalam desa. Dengan di buktikan di salah satu contoh uni usaha produksi keripik dimana ahan

baku yang diperoleh dari sumber daya alam yang ada dari desa dan diproduksi oleh para masyarakat desa yang selanjutnya proses pemasarannya pun kembali didistribusikan kedalam desa. Dan dengan inilah merupakan salah satu dari upaya Badan Usaha Milik Desa didalam meningkatkan perekonomian Masyarakat Desa.

Analisa Data

Perkembangan ekonomi yang ada di desa Morosari dari sebelum adanya BUMDes dan setelah adanya BUMDes mengalami perubahan yang sangat signifikan. Pengembangan ekonomi yang tujuannya untuk meningkatkan perekonomian desa lebih meningkat dari tahun yang sebelumnya. Salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan adanya BUMDes, keberadaan BUMDes disini diharapkan dapat berkontribusi penuh terhadap peningkatan perkonomi masyarakat desa, agar desa memiliki kemandirian sendiri didalam mengelola keuangan desa tidak hanya berpatokan pada DD dan ADD yang di peroleh dari pemerintah, akan tetapi juga mendapatkan pemasukan yang lain dari asset desa. Secara keseluruhan peningkatan ekonomi masyarakat desa yang ada di desa morosari semenjak adanya BUMDes sedikit mengalami peningkatan jika di bandingkan dari tahun-tahun yang sebelumnya. Dimana dahulu sebelum adanya BUMDes para masyarakat desa kesulitan menjual hasil dari Sumber Daya Alam yang ada salah satunya seperti hasil perkebunan yaitu singkong dan buah pisang. Kebanyakan masyarakat hanya menjual hasil panen ke pasar-pasar terdekat dan dengan hasil jual yang sangat minim sekali. Akan tetapi setelah adanya unit usaha yang didirikan BUMDes Mekar Sari yaitu unit Usaha keripik, jadinya hasil panen tadi disetorkan ke BUMDes dan diproduksi untuk dijadikan kripik, sehingga nilai jualnya akan semakin tinggi. Disisi lain juga dengan adanya unit usaha baru ini, juga dapat menambah lowongan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar untuk ikut serta didalam proses produksinya.

Desa morosari sudah mendirikan BUMDes Mekar Sari semenjak tahun 2014, akan tetapi baru mulai berkontribusi ke Desa melalui Pendapatan Asli Desa yaitu sejak tahun 2016 dan tahun 2017. Keberadaan BUMDes Mekar Sari masih sangat minim upayaannya didalam pengembangan ekonomi di Desa Morosari. Hal ini dikarenakan BUMDes Mekar Sari masih berada pada tahap perintisan serta kurangnya SDM yang ada. Dari beberapa unit usaha yang dimiliki oleh BUMDes Mekar Sari hanya unit usaha persewaan molem dan terop saja yang berjalan dengan signifikan, ditambah dengan unit usaha keripik yang proses produksinya

kadang-kadang masih terhambat dikarenakan SDM serta proses pemasaran yang terhambat. Terdapat beberapa kondisi dimana sebelum dan sesudah adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekar Sari di desa ini. Berkaitan dengan adanya beberapa kondisi yang memungkinkan pemerintah Desa Morosari mendirikan Badan Usaha ini. Sejauh ini seiring dengan berjalannya waktu dengan adanya BUMDes cukup berperan didalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Morosari.

Tabel 3. Perbedaan Kondisi sebelum dan setelah ada BUMDes

No	Sebelum adanya BUMDes	Sesudah adanya BUMDes
1	Pendapatan Asli Desa terus diupayakan untuk bertambah dengan hasil dari pengelolaan asset desa yang telah dimiliki.	BUMDes yang melanjutkan pengelolaan hasil asset desa. Serta menambah pemasukan Pendapatan Asli Desa pada tahun 2017 sebesar Rp9.264.000,00,- atau jika di prosentasekan sekitar 0,064%.
2	Terdapat Bebarapa Masyarakat yang mengganggu.	Setelah adanya beberapa unit usaha BUMDes Mekar Sari dapat menyerap angka tenaga kerja masyarakat desa Morosari
3	Hasil Sumber Daya Alam berupa hasil panen yang sulit dalam menjualnya	Dengan adanya unit usaha pembuatan kripik, hasil panen berupa singkong dan pisang sekarang menjadi mudah dalam menjualnya, dikarenakan hasil SDA dari desa tersebut kembali diproduksi oleh BUMDes yang akan di olah menjadi nilai jual yang tinggi dari sebelumnya.

Sumber: diolah dari data hasil penelitian

Kesimpulan

Upaya BUMDes Mekar Sari sangat terlihat dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Terlihat dari Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Morosari pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp9.264.000,00,- atau jika di prosentasekan sekitar 0,064% dari PAD Desa Morosari, meskipun prosentase tersebut masih terlalu sedikit, tetapi jika dibandingkan dengan pemasukan Pendapatan Asli Desa yang lainnya, sudah cukup besar. Meskipun kontribusi BUMDes Mekar Sari tidak terlalu banyak mengalir ke Pendapatan Asli Desa, akan tetapi kegiatan tersebut telah menjadikan Desa Morosari menjadi mandiri sehingga tidak selalu bergantung dengan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa (ADD). Kurnag optimalnya peran BUMDes Mekar Sari dalam pengembangan ekonomi desa yaitu terkait dengan tahapan awal yang masih dilakukan sebagai upaya rintisan, sehingga masih memiliki banyak kekurangan dalam pelaksanaannya, akan tetapi

jika diimbangi dengan pengembangan unit usaha yang ada pastinya akan meningkat juga hasil prosentase yang diperoleh pertahunnya.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kami tujukan kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo sebagai almamater kami tercinta.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, M. R. R. S. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi pada Bumdes di Gunung Kidul, Yogyakarta. *Modus*, 28(2), 155–167. Retrieved From <Http://Ojs.Uajy.Ac.Id/Index.Php/Modus/Article/Viewfile/848/783>.
- Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, S. (2012). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). *Administrasi Publik (JAP)*, 1(6), 1203–1212. Retrieved From <Http://Administrasipublik.Studentjournal.Ub.Ac.Id/Index.Php/Jap/Article/View/193/173>.
- Dwi Febri Arifiyanto, T. K. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. *RISSET AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, 2(3), 473–485. Retrieved From <Http://Ejournal.Upi.Edu/Index.Php/JRAK/Article/View/6598/4476>.
- Erlin Damayanti, Mochammad Saleh Soeaidy, H. R. (2011). Strategi Capacity Building Pemerintah Desa dalam Pengembangan Potensi Kampong Ekowisata Berbasis Masyarakat Lokal (Studi Di Kampong Ekowisata, Desa Bendosari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang). *Administrasi Publik*, 2(3), 464–470. Retrieved From <Http://Administrasipublik.Studentjournal.Ub.Ac.Id/Index.Php/Jap/Article/View/408/292>.
- Indrianasari, N. T. (2017). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono). *Asset*, 1(2), 29–46. Retrieved From <Http://Ejournal.Stiewidyagamalumajang.Ac.Id/Index.Php/Asset/Article/View/28/22>.
- Isto Widodo. (2017). Dana Desa Dan Demokrasi Dalam Perspektif Desentralisasi Fiskal. *Indonesia Political Science Review*, 2(6), 65–85. Retrieved From <Https://Journal.Unnes.Ac.Id/Nju/Index.Php/Jpi/Article/View/8487/5645>.
- Oleh, H. F. (2014). Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 2(1), 1–8. Retrieved From <Http://Journal.Unair.Ac.Id/Download-Fullpapers-Kmp945d6ad757full.Pdf>.

Queen, V., & Widi, A. (2016). Peran Pemerintah Desa dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). *Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 5(2), 59–63. Retrieved From [Https://Publikasi.Unitri.Ac.Id/Index.Php/Fisip/Article/View/244/268](https://Publikasi.Unitri.Ac.Id/Index.Php/Fisip/Article/View/244/268).

Syamsi, S. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa. *Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 3(1), 21–28. Retrieved From [Https://Publikasi.Unitri.Ac.Id/Index.Php/Fisip/Article/View/69/74](https://Publikasi.Unitri.Ac.Id/Index.Php/Fisip/Article/View/69/74).

Zulkarnaen, R. M. (2016). Kondisi Masyarakat Sebelum BUMDES Pendirian BUMDES Sebagai Lembaga Ekonomi Guna Mengelola Aset, Jasa Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Dharmakarya*, 5 (1), 1–4. Retrieved From Journal.Unpad.Ac.Id/Dharmakarya/Article/Download/11430/5226.

Diakses Dari [Http://Www.Djpk.Kemenkeu.Go.Id/?P=5800](http://Www.Djpk.Kemenkeu.Go.Id/?P=5800) Pada 11 Januari 2019.